

Perkuat Sinergitas, Kapolda Bengkulu Silaturahmi ke BPK, BI, dan Dirjen Perbendaharaan Negara



BENGKULU– Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si didampingi Pejabat Utama (PJU) Polda Bengkulu melakukan serangkaian kunjungan silaturahmi ke dua instansi pemerintahan dan bank nasional Perwakilan Provinsi Bengkulu, Rabu (14/10) sejak pukul 09.00 WIB.

Kegiatan diawali dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu yang disambut baik oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu, Andri Yogama, SE., MM., Ak., CSFA.

“Saya berharap, semoga dengan adanya silaturahmi ini dapat menjalin sinergitas antara kepolisian Polda Bengkulu dengan BPK Provinsi Bengkulu yang bertujuan memperkuat pengawasan anggaran negara dan meningkatkan kerja sama di bidang penyidikan tindak pidana korupsi,” ujar Kapolda Bengkulu.

Kegiatan silaturahmi ini berjalan dengan hangat dan penuh suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan saling bertukar plakat sebagai tanda terjalinnya silaturahmi dan sinergitas antar kedua pihak.

Selanjutnya, Kapolda Bengkulu bersama PJU Polda Bengkulu melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu dan diterima baik oleh Kepala Perwakilan Kantor BI Provinsi Bengkulu, Joni Marsius.

Selain itu, Kapolda Bengkulu juga melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) wilayah Provinsi Bengkulu dan diterima oleh Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra, SE, MM.

Sebelumnya, pada Selasa, 11 Agustus 2020, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyepakati sinergitas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dengan Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan. Hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA. dengan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dan Jaksa Agung RI Dr. H. ST. Burhanuddin, S.H., M.H., di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada hari ini (11/8).

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dihadiri secara fisik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen. Pol. Drs. Firlu Bahuri, M.Si., dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA serta disaksikan oleh para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), pejabat di lingkungan BPK, Kepolisian (Kapolres), dan Kejaksaan (Kajari) seluruh Indonesia secara virtual. Penandatanganan ini juga diikuti oleh salam sinergitas antara BPK-Kepolisian-Kejaksaan di 11 Provinsi yaitu di Sumatera Utara, Sumatera Selatan,

Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat yang diwakili oleh para Kepala Perwakilan BPK bersama para Kajati dan Kapolda pada Provinsi tersebut.

Nota Kesepahaman BPK dan Polri berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama Kejaksaan, BPK menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sumber berita:

1. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-sepakati-sinergitas-tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-dengan-polri-dan-kejaksaan>, Selasa, 11 Agustus 2020
2. <https://www.beritasatu.com/jayanty-nada-shofa/nasional/664461/perkuat-sinergi-bpk-teken-mou-dengan-polri-dan-kejaksaan>, Selasa, 11 Agustus 2020
3. <https://rakyatbengkulu.com/2020/10/14/perkuat-sinergitas-kapolda-bengkulu-silaturahmi-ke-bpk-bi-dan-dirjen-perbendaharaan-negara/>, Rabu, 14 Oktober 2020
4. <https://www.beritamerdekaonline.com/2020/10/14/kapolda-bengkulu-kunjungi-bpk-bi-dan-dirjen-perbendaharaan-negara-perkuat-sinergitas/>, Kamis, 15 Oktober 2020

Catatan:

Pada 11 Agustus 2020, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Nomor 5/NK/X-XIII.2/8/2020 dan Nomor NK/29/VIII/2020 antara BPK RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pemeriksaan, Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan yang Berindikasi Kerugian Negara dan/atau Unsur Pidana, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- pertukaran data dan/atau informasi;
- pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli;
- peningkatan kapasitas dan/atau pemanfaatan sumber daya; dan
- bantuan pengamanan.